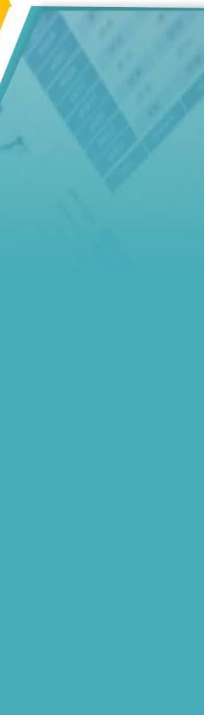


2023

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN
KOTA PAYAKUMBUH





WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 065.8/486/WK-PYK/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah harus mampu menyesuaikan terhadap perkembangan kondisi daerah yang berlangsung dengan tetap berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 367 Ayat (2) menyatakan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 54);
8. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota payakumbuh Tahun 2023-2026;
9. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang merupakan Perubahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2023.
- KETIGA : Perangkat Daerah yang menyusun Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada dictum kedua sebagai berikut:
- a. dinas pendidikan
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - f. badan penanggulangan bencana daerah;
 - g. dinas sosial;
 - h. dinas tenaga kerja dan perindustrian;
 - i. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - j. dinas ketahanan pangan;
 - k. dinas lingkungan hidup;
 - l. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. dinas perhubungan;
 - n. dinas komunikasi dan informatika;
 - o. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - p. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - q. dinas pariwisata, pemuda dan olah raga;
 - r. dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - s. dinas pertanian;
 - t. sekretariat daerah;
 - u. sekretariat dprd;
 - v. badan perencanaan pembangunan daerah;
 - w. badan keuangan daerah;
 - x. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - y. inspektorat;
 - z. kecamatan payakumbuh utara;
 - aa. kecamatan payakumbuh barat;
 - bb. kecamatan payakumbuh timur;
 - cc. kecamatan payakumbuh selatan;
 - dd. kecamatan lamposi tigo nagori; dan
 - ee. kantor kesbangpol.
- KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat evaluasi Renja Tahun sebelumnya sampai triwulan II tahun berjalan, perubahan terhadap program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, unsur penunjang, unsur pendukung, unsur

pengawasan, unsur kewilayahan dan kesbangpol sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

- KELIMA : Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEENAM : Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 mempedomani dan mengacu pada :
- a. rencana pembangunan daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
 - b. renstra perangkat daerah tahun 2023-2026;
 - c. rencana tata ruang wilayah Kota Payakumbuh;
 - d. hasil evaluasi tahun n-1 dan evaluasi sampai triwulan II tahun berjalan.
- KETUJUH : Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 bertujuan untuk :
- a. menyesuaikan perencanaan teknis Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun berjalan; dan
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 31 Agustus 2023

Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.
2. Arsip.

KATA PENGATAR

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Ekonomi masyarakat melalui berbagai program tenaga kerja dan perindustrian sudah dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, tetapi dengan berjalannya waktu ada dilakukan beberapa perubahan/perbaikan kegiatan baik di bidang tenaga kerja maupun perindustrian untuk kelancaran kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Alhamdulillah, dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, proses dan tahapan Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 ini sudah dapat di rampungkan. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Petunjuk Pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa penyusunan dokumen Rencana Kerja ini merupakan bagian dari Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan kata lain, Renja ini adalah jabaran rinci dan kongkrit dari RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 berdasarkan kewenangan urusan yang di kelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

Semoga Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat memberi manfaat bagi segenap Stakeholders terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan dan tugas pokok kedinasan. Terima Kasih.

Payakumbuh, Agustus 2023
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh



FUNIDA FATWA, S.Sos, M.Si
NIP. 19670601 198809 2 001

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2023	7
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD	20
BAB IV PENUTUP	41
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Sampai Dengan Bulan Juni 2023 Kota Payakumbuh	9
Tabel 2.a	: Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Kota Payakumbuh	24
Tabel 2.b	: Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Sesuai Sumber Pendanaan	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansial adalah penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 adalah pelaksanaan tahun pertama dari Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Renja ini merupakan penjabaran Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 dalam pelaksanaannya, mengalami situasi kondisi yang membutuhkan penyesuaian terhadap dinamika sosial masyarakat.

Rancangan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan OPD sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2023 dalam rangka untuk menyesuaikan situasi dan kondisi pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh saat ini, agar pelayanan penyelenggaraan administrasi dapat maksimal/berjalan lancar.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2023 adalah :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- b. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan.
- c. Adanya pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.
- d. Adanya belanja yang belum terakomodir dalam SSH/SBU sistim.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 05);

21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 4);
22. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 (Berita Acara Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 10);
24. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 (Berita Acara Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 21);
25. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Renja ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2023. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2023 dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja OPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

2. Tujuan

Perubahan Renja disusun sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada triwulan ketiga dan keempat Tahun 2023 sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan Perubahan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Perubahan dilakukan adanya pergeseran antar rekening dalam kegiatan.
2. Perubahan dilakukan adanya perbaikan nama dalam rekening kegiatan.
3. Adanya perubahan jadwal, pos anggaran bahan praktek, tempat dan kegiatan yang akan diikuti.
4. Adanya rasionalisasi kegiatan, dana tersebut dipindahkan kepada kegiatan yang perlu penambahan anggaran.
5. Adanya belanja yang belum terakomodir di SSH/SBU dalam aplikasi.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN
BULAN JUNI 2023

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, memiliki tujuan yaitu :

1. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran;
2. Meningkatnya sektor strategis.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya serapan tenaga kerja;
2. Meningkatnya produksi industri pengolahan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 melaksanakan 3 urusan dan UPTD P3R Sentra Randang yakni :

- a. Urusan Sekretariat dengan melaksanakan 1 program, 7 kegiatan dan 21 sub kegiatan
- b. Urusan Tenaga Kerja dengan melaksanakan 4 program, 5 kegiatan dan 7 sub kegiatan
- c. Urusan Perindustrian dengan melaksanakan 2 program, 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan
- d. UPTD P3R Sentra Randang dengan melaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan dalam masa RPD Tahun 2023-2026 sampai dengan bulan Juni 2023. Untuk evaluasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Terdiri dari 1 program, 7 kegiatan dengan 21 sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.481.175.782,- terealisasi sebesar Rp. 1.253.776.475,- atau 36,02%.

2. Bidang Tenaga Kerja

Terdiri dari 4 program, 5 kegiatan dengan 7 sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 642.386.890,- terealisasi sebesar Rp. 38.337.590,- atau 5,97%.

3. Bidang Perindustrian

Terdiri dari 2 program, 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 978.375.956,- terealisasi sebesar Rp. 192.688.857,- atau 19,69%.

4. UPTD P3R Sentra Randang

Terdiri dari 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 507.653.962,- terealisasi sebesar Rp. 151.555.304,- atau 29,85%.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 sebanyak 7 program, 14 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 5.609.592.590,- dan realisasinya sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar Rp. 2.166.974.515,- atau 38,63%.

Adapun rincian program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 1 : Evaluasi Hasil Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sampai dengan bulan Juni 2023.

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 (Tahun Akhir Periode Renstra) (Rp.)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (Rp.)		Target Kinerja Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Bulan Juni Tahun 2023				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Bulan Juni Tahun 2023	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Target Kinerja (%)
														K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)						(3)	(4)		(5)		(6)*	(7)*	(*8)**	(9)**	(10)=(8/6)	(11)=9/7	(12)=(5+9)	(13)=(12/4)
2 07 01 2 01 07	SUB KEGIATAN :	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	11 laporan	61,964,220			11 laporan	84,086,000	5	39,804,900	36.36	47.34	39,804,900	0.64				
2 07 01 2 02	KEGIATAN :	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	80%	2,536,215,772	80%	2,243,928,282	80%	2,719,463,800		1,169,455,480		43.00	3,413,383,762	1.35				
2 07 01 2 02 01	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang	2,327,023,772	39 orang	2,243,928,282	21 orang	2,455,271,800	20	1,095,767,480	100.00	44.63	3,339,695,762	1.44				
2 07 01 2 02 02	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	209,192,000			1 dokumen	264,192,000		73,688,000		27.89	73,688,000	0.35				
2 07 01 2 05	KEGIATAN :	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Berpakaian Dinas Dengan Atribut Lengkap	100%	1,000,000	100%	9,880,000	100%	12,600,000		12,600,000		100.00	22,480,000	22.48				
2 07 01 2 05 02	SUB KEGIATAN :	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	21 paket	1,000,000	19 set	9,880,000	21 paket	12,600,000	21	12,600,000	100.00	100.00	22,480,000	22.48				
2 07 01 2 06	KEGIATAN :	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana penunjang operasional Kantor	80%	145,898,920	80%	403,540,129	80%	229,541,040		167,574,844		73.00	571,114,973	3.91				
2 07 01 2 06 01	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	6 paket	1,998,150	7 jenis	4,003,300	6 paket	1,998,150	6	1,993,900	100.00	99.79	5,997,200	3.00				
2 07 01 2 06	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli		1,000,000						-								

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 (Tahun Akhir Periode Renstra) (Rp.)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (Rp.)		Target Kinerja Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Bulan Juni Tahun 2023				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Bulan Juni Tahun 2023	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Target Kinerja (%)
													K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)					(3)	(4)		(5)		(6)*	(7)*	(8)**	(9)**	(10)=(8/6)	(11)=9/7	(12)=(5+9)	(13)=(12/4)
2 07 01 2 06 03	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	10 paket	5,000,000			10 paket	12,000,000	10	9,500,000	100.00	79.17	9,500,000	1.90			
2 07 01 2 06 04	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	63 paket	18,015,950	86 jenis	48,704,060	63 paket	28,015,950	46	14,142,470	73.02	50.48	62,846,530	3.49			
2 07 01 2 06 05	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 paket	13,344,380	9 jenis	27,821,330	9 paket	19,344,380	9	15,635,625	77.78	80.83	43,456,955	3.26			
2 07 01 2 06 06	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 dokumen	6,004,560	1016 koran	6,004,560	2 dokumen	6,004,560	2	1,860,000	100.00	30.98	7,864,560	1.31			
2 07 01 2 06 08	SUB KEGIATAN :	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	10 laporan	10,500,000	780 porsi	13,387,900	10 laporan	10,500,000	1	1,720,000	10.00	16.38	15,107,900	1.44			
2 07 01 2 06 09	SUB KEGIATAN :	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25 laporan	90,035,880	50 kali	303,618,979	25 laporan	151,678,000	15	122,722,849	60.00	80.91	426,341,828	4.74			
2 07 01 2 07	KEGIATAN :	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memakai barang milik daerah	100%	3,000,000	0	100%	32,967,000	30,662,000	93.01	30,662,000	10.22						
2 07 01 2 07 02	SUB KEGIATAN :	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibeli	1 unit	1,000,000			3 unit	32,967,000	3	30,662,000	100.00	93.01	30,662,000	30.66			
2 07 01 2 07 05	SUB KEGIATAN :	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang dibeli	1 unit	1,000,000													

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 (Tahun Akhir Periode Renstra) (Rp.)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (Rp.)		Target Kinerja Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Bulan Juni Tahun 2023				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Bulan Juni Tahun 2023	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Target Kinerja (%)
													K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)					(3)	(4)		(5)		(6)*	(7)*	(*8)**	(9)**	(10)=(8/6)	(11)=9/7	(12)=(5+9)	(13)=(12/4)
2 07 01 2 07 06	SUB KEGIATAN :	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	1,000,000													
2 07 01 2 08	KEGIATAN :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana penunjang operasional kantor	80%	218,652,240	80%	238,993,686	80%	259,456,552		120,257,279		46.35	359,250,965	1.64			
2 07 01 2 08 01	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	2,205,000	57 lembar	570,000	1 laporan	2,205,000		600,000		27.21	1,170,000	0.53			
2 07 01 2 08 02	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	99,195,956	2 rekening	120,876,918	1 laporan	140,000,268		72,161,144		51.54	193,038,062	1.95			
2 07 01 2 08 04	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	117,251,284	- 4 orang - 400 porsi	117,546,768	1 laporan	117,251,284		47,496,135		40.51	165,042,903	1.41			
2 07 01 2 09	KEGIATAN :	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan	80%	107,291,240	80%	103,873,802	80%	110,198,600		47,933,806		43.50	151,807,608	1.41			
2 07 01 2 09 01	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	39,190,000	1 unit	39,072,913	1 unit	39,190,000	1	14,002,346	100.00	35.73	53,075,259	1.35			
2 07 01 2 09 02	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	59,400,000	12 unit	59,207,289	12 unit	59,400,000	12	31,326,560	100.00	52.74	90,533,849	1.52			

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 (Tahun Akhir Periode Renstra) (Rp.)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (Rp.)		Target Kinerja Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Bulan Juni Tahun 2023				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Bulan Juni Tahun 2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Target Kinerja (%)
									K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)*	(7)*	(8)**	(9)**	(10)=(8/6)	(11)=9/7	(12)=(5+9)	(13)=(12/4)
2 07 01 2 09 05	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit mebel yang dipelihara	35 unit	4,184,920	48 buah	5,593,600	48 unit	5,638,600		-		0.00	5,593,600	1.34
2 07 01 2 09 06	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 unit	4,516,320			9 unit	5,970,000	4	2,604,900	44.44	43.63	2,604,900	0.58
2 07 02	PROGRAM : PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	0,8%	2,000,000		0	0,8%	59,993,860		0			0	0
2 07 02 2 01	KEGIATAN : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	0,8%	2,000,000		0	0,8%	59,993,860		0				
2 07 02 2 01 01	SUB KEGIATAN : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 dokumen	1,000,000			1 dokumen	49,954,260		0				
2 07 02 2 01 02	SUB KEGIATAN : Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang menyusun RTK mikro	1 perusahaan	1,000,000			1 perusahaan	10,039,600		0				
2 07 03	PROGRAM : PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,92%	76,000,000	- 99 org - 75 org	193,582,881	3,92%	440,189,118		128,980,900		29.30	322,563,781	4.24
2 07 03 2 01	KEGIATAN : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	80%	75,000,000	80%	193,582,881	80%	440,189,118		128,980,900		29.30	322,563,781	4.30
2 07 03 2 01 01	SUB KEGIATAN : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun n	16 orang	74,000,000	48 orang	193,582,881	68 orang	440,189,118	32	128,980,900		29.30	322,563,781	4.36

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 (Tahun Akhir Periode Renstra) (Rp.)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (Rp.)		Target Kinerja Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Bulan Juni Tahun 2023				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Bulan Juni Tahun 2023	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Target Kinerja (%)
														K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)						(3)	(4)		(5)		(6)*	(7)*	(8)**	(9)**	(10)=(8/6)	(11)=9/7	(12)=(5+9)	(13)=(12/4)
2 07 03 2 01 03	SUB KEGIATAN :	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 unit	1,000,000														
2 07 03 2 02	KEGIATAN :	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		1,000,000														
2 07 03 2 02 01	SUB KEGIATAN :	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	1 lembaga	1,000,000														
2 07 04	PROGRAM :	PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	46,35%	119,586,952	267 org	115,539,182	46,35%	114,586,462		35,655,498		31.12	151,194,680	1.26				
2 07 04 2 01	KEGIATAN :	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	46,35%	27,448,390	20 org	31,308,550	46,35%	27,448,030		0			31,308,550	1.14				
2 07 04 2 01 01	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan Lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi		1,000,000														
2 07 04 2 01 05	SUB KEGIATAN :	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	20 orang	26,448,390	20 orang	31,308,550	20 orang	27,448,030					31,308,550	1.18				

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 (Tahun Akhir Periode Renstra) (Rp.)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (Rp.)		Target Kinerja Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Bulan Juni Tahun 2023				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Bulan Juni Tahun 2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Target Kinerja (%)
									K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)*	(7)*	(*8)**	(9)**	(10)=(8/6)	(11)=9/7	(12)=(5+9)	(13)=(12/4)
2 07 04 2 03	KEGIATAN : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja	80%	88,138,432	80%	84,230,632	80%	87,138,432		35,655,498		40.92	119,886,130	1.36
2 07 04 2 03 01	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		1,000,000						-				
2 07 04 2 03 02	SUB KEGIATAN : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	250 orang	87,138,432	3 orang	84,230,632	250 orang	87,138,432	142	35,655,498	46.80	40.92	119,886,130	1.38
2 07 04 2 04	KEGIATAN : Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI yang Dilindungi		4,000,130		0		0		0				
2 07 04 2 04 01	SUB KEGIATAN : Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		4,000,130										
2 07 05	PROGRAM : HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,03%	21,617,800	1 kasus	18,964,680	4,03%	27,617,450		4,265,900		52.34	23,230,580	1.07

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 (Tahun Akhir Periode Renstra) (Rp.)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (Rp.)		Target Kinerja Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Bulan Juni Tahun 2023				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Bulan Juni Tahun 2023	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Target Kinerja (%)
													K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)					(3)	(4)		(5)		(6)*	(7)*	(*8)**	(9)**	(10)=(8/6)	(11)=9/7	(12)=(5+9)	(13)=(12/4)
2 07 05 2 02	KEGIATAN :	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	75%	21,617,800	1 kasus	18,964,680	75%	27,617,450		4,265,900		52.34	23,230,580	1.07			
2 07 05 2 02 01	SUB KEGIATAN :	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	7 perkara	17,538,650	50 perusahaan	15,153,280	7 perkara	23,538,300	2	2,577,400		10.95	17,730,680	1.01			
2 07 05 2 02 02	SUB KEGIATAN :	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	3 perkara	4,079,150	1 kasus	3,811,400	3 perkara	4,079,150	4	1,688,500	33.33	41.39	5,499,900	1.35			
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						765,046,069	1,079,628,392	1,486,029,918	388,203,088	26.12	1,467,831,480	1.92					
3 31 02	PROGRAM :	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri yang menerapkan Teknologi Tepat Guna	0,10%	735,816,299	0,52%	1,019,053,702	0,10%	1,193,896,958		358,597,580		30.04	1,377,651,282	1.87			
			Persentase sentra/klaster industri yang tertata	20%		75%		20%										

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 (Tahun Akhir Periode Renstra) (Rp.)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (Rp.)		Target Kinerja Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Bulan Juni Tahun 2023				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Bulan Juni Tahun 2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Target Kinerja (%)
									K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)*	(7)*	(*8)**	(9)**	(10)=(8/6)	(11)=9/7	(12)=(5+9)	(13)=(12/4)
3 31 02 2 01	KEGIATAN : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66,67%	735,816,299	5 dok	1,019,053,702	66,67%	1,193,896,958		358,597,580		30.04	1,377,651,282	1.87
3 31 02 2 01 01	SUB KEGIATAN : Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	1 dokumen	500,000			1 dokumen	174,593,340		3,757,750		2.15	3,757,750	7.52
3 31 02 2 01 02	SUB KEGIATAN : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	1 dokumen	77,162,337	- 2 buku - 2 event	333,545,078	1 dokumen	338,487,870		121,208,704		35.81	454,753,782	5.89
3 31 02 2 01 03	SUB KEGIATAN : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	1 dokumen	30,000,000	10 IKM	29,572,080	1 dokumen	31,108,220		-		0.00	29,572,080	0.99
3 31 02 2 01 04	SUB KEGIATAN : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	1 dokumen	492,653,962	13 orang	521,108,928	1 dokumen	507,653,962		195,514,231		38.51	716,623,159	1.45
3 31 02 2 01 05	SUB KEGIATAN : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 dokumen	135,000,000	- 4 orang - 15 IKM	134,827,616	1 dokumen	142,053,566		38,116,895		28.27	172,944,511	1.28

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 (Tahun Akhir Periode Renstra) (Rp.)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (Rp.)		Target Kinerja Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Bulan Juni Tahun 2023				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Bulan Juni Tahun 2023		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Target Kinerja (%)	
														K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)						(3)	(4)		(5)		(6)*	(7)*	(*8)**	(9)**	(10)=(8/6)	(11)=9/7	(12)=(5+9)	(13)=(12/4)	
3	31	02	2	01	06	SUB KEGIATAN :	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri		500,000										
3	31	03				PROGRAM :	PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Industri Yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk	2,40%	26,229,770	8,40%	60,574,690	2,40%	292,132,960		29,605,508		10.13	90,180,198	3.44
3	31	03	2	01		KEGIATAN :	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku industri yang difasilitasi	6 IKM	26,229,770	6 IKM	60,574,690	6 IKM	292,132,960		29,605,508		10.13	90,180,198	3.44
3	31	03	2	01	01	SUB KEGIATAN :	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan risiko usaha menengah-tinggi dan tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS	1 dokumen	26,229,770	6 IKM	60,574,690	1 dokumen	292,132,960		29,605,508		10.13	90,180,198	3.44
3	31	04				PROGRAM :	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Data Perusahaan IKM yang Masuk Ke Dalam SIINas		3,000,000										

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 (Tahun Akhir Periode Renstra) (Rp.)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (Rp.)		Target Kinerja Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Bulan Juni Tahun 2023				Capaian Target Kinerja Renstra s/d Bulan Juni Tahun 2023			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target Kinerja	Realisasi Tingkat Capaian Target Kinerja (%)		
									K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)*	(7)*	(*8)**	(9)**	(10)=(8/6)	(11)=9/7	(12)=(5+9)	(13)=(12/4)		
3	31	04	2	01												
							3,000,000									
3	31	04	2	01	01	SUB KEGIATAN :		1,000,000								
3	31	04	2	01	02	SUB KEGIATAN :		1,000,000								
3	31	04	2	01	03	SUB KEGIATAN :		1,000,000								
TOTAL								4,087,136,003		4,507,201,524		5,609,592,590		2,166,974,515		38..63

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

Secara umum pelaksanaan Renja OPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yang melaksanakan 1 (satu) urusan wajib dan 1 (satu) urusan pilihan. Adapun pada Rencana Rancangan Perubahan Renja OPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan rincian kegiatan ada sebanyak 20 Sub Kegiatan yang diusulkan dalam anggaran perubahan Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 14.863.840,- menjadi Rp. 17.917.040,- (Dalam anggaran perubahan bertambah Rp. 3.053.200,-). Penambahan anggaran dikarenakan makan minum rapat tidak mencukupi.
2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 84.086.000,- menjadi Rp. 90.106.000,- (Dalam anggaran perubahan bertambah Rp. 6.020.000,-). Penambahan anggaran dikarenakan makan minum rapat tidak mencukupi.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 2.455.271.800,- menjadi Rp. 2.436.371.905,- (Dalam anggaran perubahan berkurang Rp. 18.899.895,-). Efisiensi anggaran/penyesuaian belanja.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran Rp. 264.192.000,-. menjadi Rp. 176.851.200,- (Dalam anggaran perubahan kurang Rp. 87.340.800,-). Pengurangan anggaran karena adanya sisa belanja dan dipindahkan ke beberapa sub kegiatan.
5. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp. 12.000.000,- menjadi Rp. 18.882.000,- (Dalam anggaran perubahan bertambah Rp. 6.882.000,-). Penambahan anggaran untuk pembelian feling kabinet.
6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp. 28.015.950,- menjadi Rp. 32.651.250,- (Dalam anggaran perubahan

- bertambah Rp. 4.635.300,-). Penambahan anggaran untuk pembelian alat tulis kantor tidak mencukupi.
7. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 19.344.380,- menjadi Rp. 22.193.180,- (Dalam anggaran perubahan bertambah Rp. 2.848.800,-). Penambahan anggaran untuk fotocopy dan cetak.
 8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 151.678.000,- menjadi Rp. 182.340.000,- (Dalam anggaran perubahan bertambah Rp. 30.662.000,-). Penambahan anggaran dikarenakan SPPD dalam dan luar daerah tidak mencukupi.
 9. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 32.967.000,- menjadi Rp. 37.851.000,- (Dalam anggaran perubahan bertambah Rp. 4.884.000,-). Penambahan anggaran untuk pembelian printer.
 10. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 140.000.268,- menjadi Rp. 169.947.468,- (Dalam anggaran perubahan bertambah Rp. 29.947.200,-). Penambahan anggaran untuk belanja rekening listrik.
 11. Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 117.251.284,- menjadi Rp. 117.250.488,- (Dalam anggaran perubahan berkurang Rp. 796,-). Penyesuaian pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
 12. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro dengan anggaran Rp. 10.039.600,- menjadi Rp. 10.039.600,- Tidak terjadi perubahan anggaran, tapi hanya pergeseran belanja antar rekening.
 13. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi dengan anggaran Rp. 440.189.118,- menjadi Rp. 440.188.834,- Dalam anggaran perubahan berkurang Rp. 284,-). Penyesuaian/pergeseran belanja antar rekening.
 14. Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dengan anggaran Rp. 27.448.030,- menjadi Rp. 27.447.880,- (Dalam anggaran perubahan

- bertambah Rp. 150,-). (Dalam anggaran perubahan bertambah Rp. 150,-). Penyesuaian/pergeseran belanja antar rekening.
15. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online dengan anggaran Rp. 87.138.432,- menjadi Rp. 85.548.146,- (Dalam anggaran perubahan berkurang Rp. 1.590.286,-). Efisiensi anggaran, dipindahkan ke sub kegiatan perjalanan dinas dan penyesuaian pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
 16. Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 23.538.300,- menjadi Rp. 23.538.150,-. Dalam anggaran perubahan berkurang Rp. 150,-). Penyesuaian/pergeseran belanja antar rekening.
 17. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dengan anggaran Rp. 31.108.220,- menjadi Rp. 31.108.120,- (Dalam anggaran perubahan bertambah Rp. 100,-). Pergeseran belanja antar rekening.
 18. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dengan anggaran Rp. 507.653.962,- menjadi Rp. 507.653.931,- (Dalam anggaran perubahan berkurang Rp. 31,-). Penyesuaian pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan pergeseran belanja antar rekening.
 19. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan anggaran Rp. 142.053.566,- menjadi Rp. 142.053.558,- (Dalam anggaran perubahan berkurang Rp. 8,-). Penyesuaian pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
 20. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan anggaran Rp. 292.132.960,- menjadi Rp. 292.132.960,- Tidak terjadi perubahan anggaran, tapi hanya pergeseran belanja antar rekening.

Selanjutnya dari 20 Sub Kegiatan yang diusulkan dalam anggaran perubahan dari Rp. 4.880.972.710,-, menjadi Rp. 4.862.072.710,- berkurang sebesar Rp. 18.900.000,-. Sehingga secara keseluruhan anggaran perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 sebesar Rp. 5.590.692.590,-, untuk lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.a : Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja OPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023 dan tabel 2.b : Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2023 sesuai Sumber Pendanaan.

Tabel 2.a
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023 KOTA PAYAKUMBUH

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)					Perkiraan Maju Tahun 2024		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7-6	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2	07												Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					4,123,562,672	4,104,662,811	(18,899,861)			5,299,636,046			
2	07	01											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai IKM		90	3,481,175,782	3,463,866,791	-17,308,991			91	3,244,506,382		
		Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat		A						A			
2	07	01	2.01										
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja program/kegiatan		80%	116,948,790	126,021,990	9,073,200			80%	70,765,600		
2	07	01	2.01	01									
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 dokumen	14,863,840	17,917,040	3,053,200	DAU Bebas		4 dok	19,266,350		
2	07	01	2.01	06									
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3 laporan	17,998,950	17,998,950	-	DAU Bebas					

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)						Perkiraan Maju Tahun 2024		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				a/b/c	1/2/2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7-6	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 07 01 2.01 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	11 laporan	84,086,000	90,106,000	6,020,000	DAU Bebas	12 laporan	51,499,250		
2 07 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas		80%	2,719,463,800	2,613,223,105	-106,240,695		80%	2,639,575,348		
2 07 01 2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	21 orang	2,455,271,800	2,436,371,905	- 18,899,895	DAU Bebas	21 orang	2,455,511,498		
2 07 01 2.02 02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 dokumen	264,192,000	176,851,200	- 87,340,800	DAU Bebas	1 dokumen	184,063,850		
2 07 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap		100%	12,600,000	12,600,000	-		100%	-		
2 07 01 2.05 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	21 set	12,600,000	12,600,000	-	DAU Bebas				
2 07 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana penunjang operasional Kantor		80%	229,541,040	274,569,140	45,028,100		80%	146,306,550		
2 07 01 2.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	6 paket	1,998,150	1,998,150	-	DAU Bebas	6 paket	1,988,750		
2 07 01 2.06 03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	12 paket	12,000,000	18,882,000	6,882,000	DAU Bebas				
2 07 01 2.06 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	64 paket	28,015,950	32,651,250	4,635,300	DAU Bebas	63 paket	19,826,850		

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)						Perkiraan Maju Tahun 2024		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				a/b/c	1/2/2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7-6	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 07 01 2.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	10 paket	19,344,380	22,193,180	2,848,800	DAU Bebas	9 paket	15,928,550		
2 07 01 2.06 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2 dokumen	6,004,560	6,004,560	-	DAU Bebas	2 dokumen	3,008,400		
2 07 01 2.06 08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	10 laporan	10,500,000	10,500,000	-	DAU Bebas	8 laporan	10,534,000		
2 07 01 2.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	30 laporan	151,678,000	182,340,000	30,662,000	DAU Bebas	15 laporan	95,020,000		
2 07 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memakai barang milik daerah		100%	32,967,000	37,851,000	4,884,000			-		
2 07 01 2.07 06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	5 unit	32,967,000	37,851,000	4,884,000	DAU Bebas				
2 07 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana penunjang operasional kantor			259,456,552	289,402,956	29,946,404		80%	283,178,884		
2 07 01 2.08 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 laporan	2,205,000	2,205,000	-	DAU Bebas		-		
2 07 01 2.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 laporan	140,000,268	169,947,468	29,947,200	DAU Bebas	2 laporan	167,880,524		

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)						Perkiraan Maju Tahun 2024		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				a/b/c	1/2/2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7-6	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 07 01 2.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 laporan	117,251,284	117,250,488	- 796	DAU Bebas	12 laporan	115,298,360		
2 07 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan		80%	110,198,600	110,198,600	0		80%	104,680,000		
2 07 01 2.09 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 unit	39,190,000	39,190,000	-	DAU Bebas	1 unit	39,190,000		
2 07 01 2.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	12 unit	59,400,000	59,400,000	-	DAU Bebas	12 unit	59,400,000		
2 07 01 2.09 05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit mebel yang dipelihara	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	48 unit	5,638,600	5,638,600	-	DAU Bebas				
2 07 01 2.09 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9 unit	5,970,000	5,970,000	-	DAU Bebas	9 unit	6,090,000		
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun		0,8%	59,993,860	59,993,860	-			102,150		
2 07 02 2.01	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun		0,8%	59,993,860	59,993,860	-			102,150		

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)					Perkiraan Maju Tahun 2024		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)			a/b/c	1/2/2003			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7-6	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2	07	02	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 dokumen	49,954,260	49,954,260	-	DAU Bebas	-	
2	07	02	2.01	02	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang menyusun RTK mikro	Perusahaan	1 perusahaan	10,039,600	10,039,600	-	DAU Bebas	1 perusahaan	102,150
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Pencari Kerja	3,92%	440,189,118	440,188,834	-284		3,95%	1,911,487,572
2	07	03	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Pencari Kerja	80%	440,189,118	440,188,834	-284		80%	1,885,627,722
2	07	03	2.01	01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun n	Pencari Kerja	68 orang	440,189,118	440,188,834	-284	DAU Diarahkan	318 orang	1,858,873,532
2	07	03	2.01	03	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja							35 unit	26,754,190
2	07	03	2.02		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina							70%	25,859,850
2	07	03	2.02	01	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga						12 lembaga	25,859,850

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)						Perkiraan Maju Tahun 2024		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif						
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				a/b/c	1/2/2003				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7-6	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
2	07	04														
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota		46,35%	114,586,462	112,996,026	-1,590,436		46,45%	115,801,042			
2	07	04	2.01		Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	46,35%	27,448,030	27,447,880	-150		46,45%	28,662,450			
2	07	04	2.01	01	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Pencari Kerja	20 orang	27,448,030	27,447,880	- 150	Insentif Fiskal	20 orang	28,662,450		
2	07	04	2.03		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Bursa Kerja	80%	87,138,432	85,548,146	-1,590,286		80%	87,138,592			
2	07	04	2.03	02	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	Pencari Kerja	250 orang	87,138,432	85,548,146	- 1,590,286	DAU Bebas	250 orang	87,138,592		
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	75%	27,617,450	27,617,300	-150		4,03%	27,738,900			

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)						Perkiraan Maju Tahun 2024		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif							
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				a/b/c	1/2/2003					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7-6	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
2	07	05	2.02		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan		75%	27,617,450	27,617,300	-	150		75%	27,738,900		
2	07	05	2.02	01	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	Perusahaan dan Pekerja	7 perkara	23,538,300	23,538,150	-	150	DAU Bebas	7 perkara	23,538,000		
2	07	05	2.02	02	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Perusahaan dan Pekerja	3 perkara	4,079,150	4,079,150	-		DAU Bebas	3 perkara	4,200,900		
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				978,375,956	978,375,848		(108)			494,166,230		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri yang menerapkan Teknologi Tepat Guna	IKM Kota Payakumbuh	0,10%	686,242,996	686,242,888		-108		0,10%	432,166,880		
						Persentase sentra/klaster industri yang tertata		20%						20%			

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)						Perkiraan Maju Tahun 2024		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif							
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)				a/b/c	1/2/2003					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7-6	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
3	31	02	2.01		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri yang disusun	IKM Kota Payakumbuh	66,67%	686,242,996	686,242,888	-108		66,67%	432,166,880			
3	31	02	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri		1 dokumen	174,593,340	174,593,340	0	DAU Bebas		0			
3	31	02	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	IKM Kota Payakumbuh	1 dokumen	338,487,870	338,487,870	-	Insentif Fiskal	1 dokumen	250,899,825			
3	31	02	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	IKM Kota Payakumbuh	1 dokumen	31,108,220	31,108,120	-	100	DAU Bebas	1 dokumen	35,160,200		
3	31	02	2.01	05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	IKM Kota Payakumbuh	1 dokumen	142,053,566	142,053,558	-	8	Insentif Fiskal	1 dokumen	146,006,655		
3	31	02	2.01	06	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri						DAU Bebas	1 dokumen	100,200			

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Berjalan)					Perkiraan Maju Tahun 2024		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
									Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)			a/b/c	1/2/2003		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7-6	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
3	31	03	2.01	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasioani (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasioani (SIINAS)	IKM Kota Payakumbuh			-	-	-	DAU Bebas	1 dokumen	100,050		
TOTAL										5,101,938,628	5,083,038,659	- 18,899,969			5,793,802,276		

Tabel 2.b
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RENJA PD
TAHUN 2023 SESUAI SUMBER PENDANAAN

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Awal 2023 (Rp.)	Pagu Setelah Perubahan 2023 (Rp.)	Sumber Pendanaan (Rp.)										Ket
				DAU Bebas	DAK Fisik	DAK Non Fisik	DAU Diarahkan					BLUD	Insentif Fiskal	
							Bid Pendidikan	Bid Kesehatan	Bidang PUPR	Bid Kewilayahan	P3K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	07						440,188,834	-	-	-	-	-	27,447,880	
2	07	01		3,481,175,782	3,463,866,791	3,463,866,791	0	0	0	0	0	0	0	0
2	07	01	2.01				0	0	0	0	0	0	0	0
2	07	01	2.01	01	14,863,840	17,917,040	17,917,040							
2	07	01	2.01	06	17,998,950	17,998,950	17,998,950							
2	07	01	2.01	07	84,086,000	90,106,000	90,106,000							
2	07	01	2.02		2,719,463,800	2,613,223,105	2,613,223,105	0	0	0	0	0	0	0
2	07	01	2.02	01	2,455,271,800	2,436,371,905	2,436,371,905							

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Awal 2023 (Rp.)	Pagu Setelah Perubahan 2023 (Rp.)	Sumber Pendanaan (Rp.)							Ket			
								DAU Bebas	DAK Fisik	DAK Non Fisik	DAU Diarahkan					BLUD	Insentif Fiskal	
											Bid Pendidikan	Bid Kesehatan	Bidang PUPR	Bid Kewilayahan				P3K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	07	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	264,192,000	176,851,200	176,851,200										
2	07	01	2.05		Kegiatan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	12,600,000	12,600,000	12,600,000	-	-	-	-	-	-	-			
2	07	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12,600,000	12,600,000	12,600,000										
2	07	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	229,541,040	274,569,140	274,569,140	0	0	0	0	0	0	0			
2	07	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1,998,150	1,998,150	1,998,150										
2	07	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,000,000	18,882,000	18,882,000										
2	07	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28,015,950	32,651,250	32,651,250										
2	07	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,344,380	22,193,180	22,193,180										
2	07	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,004,560	6,004,560	6,004,560										
2	07	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,500,000	10,500,000	10,500,000										
2	07	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151,678,000	182,340,000	182,340,000										
2	07	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32,967,000	37,851,000	37,851,000	-	-	-	-	-	-	-			

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Awal 2023 (Rp.)	Pagu Setelah Perubahan 2023 (Rp.)	Sumber Pendanaan (Rp.)							Ket			
								DAU Bebas	DAK Fisik	DAK Non Fisik	DAU Diarahkan					BLUD	Insentif Fiskal	
											Bid Pendidikan	Bid Kesehatan	Bidang PUPR	Bid Kewilayahan				P3K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	07	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32,967,000	37,851,000	37,851,000										
2	07	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259,456,552	289,402,956	289,402,956	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	07	01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,205,000	2,205,000	2,205,000										
2	07	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140,000,268	169,947,468	169,947,468										
2	07	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117,251,284	117,250,488	117,250,488										
2	07	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110,198,600	110,198,600	110,198,600	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	07	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,190,000	39,190,000	39,190,000										
2	07	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59,400,000	59,400,000	59,400,000										
2	07	01	2.09	05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	5,638,600	5,638,600	5,638,600										
2	07	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,970,000	5,970,000	5,970,000										

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Awal 2023 (Rp.)	Pagu Setelah Perubahan 2023 (Rp.)	Sumber Pendanaan (Rp.)							Ket			
								DAU Bebas	DAK Fisik	DAK Non Fisik	DAU Diarahkan					BLUD	Insentif Fiskal	
											Bid Pendidikan	Bid Kesehatan	Bidang PUPR	Bid Kewilayahan				P3K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	59,993,860	59,993,860	59,993,860	-	-	-	-	-	-				
2	07	02	2.01		Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	59,993,860	59,993,860	59,993,860	-	-	-	-	-	-				
2	07	02	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	49,954,260	49,954,260	49,954,260										
2	07	02	2.01	02	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	10,039,600	10,039,600	10,039,600										
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	440,189,118	440,188,834	-284	0	0	440,188,834	0	0	0	0			
2	07	03	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	440,189,118	440,188,834	-284	0	0	440,188,834	0	0	0	0			
2	07	03	2.01	01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	440,189,118	440,188,834	-284			440,188,834							
2	07	03	2.01	03	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota													
2	07	03	2.02		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta													
2	07	03	2.02	01	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta													
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	114,586,462	112,996,026	85,548,146	0	0	0	0	0	0	27,447,880			

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Awal 2023 (Rp.)	Pagu Setelah Perubahan 2023 (Rp.)	Sumber Pendanaan (Rp.)							Ket			
								DAU Bebas	DAK Fisik	DAK Non Fisik	DAU Diarahkan					BLUD	Insentif Fiskal	
											Bid Pendidikan	Bid Kesehatan	Bidang PUPR	Bid Kewilayahan				P3K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	07	04	2.01		Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota	27,448,030	27,447,880	0	0	0	0	0	0	0	27,447,880			
2	07	04	2.01	01	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	27,448,030	27,447,880								27,447,880			
2	07	04	2.03		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	87,138,432	85,548,146	85,548,146	0	0	0	0	0	0	0			
2	07	04	2.03	02	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	87,138,432	85,548,146	85,548,146										
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	27,617,450	27,617,300	27,617,300	0	0	0	0	0	0	0			
2	07	05	2.02		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	27,617,450	27,617,300	27,617,300										
2	07	05	2.02	01	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23,538,300	23,538,150	23,538,150										
2	07	05	2.02	02	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,079,150	4,079,150	4,079,150										
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1,486,029,918	1,486,029,779	847,194,389	-	-	-	-	-	-	638,835,390			
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1,193,896,958	1,193,896,819	555,061,429	0	0	0	0	0	0	638,835,390			

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Awal 2023 (Rp.)	Pagu Setelah Perubahan 2023 (Rp.)	Sumber Pendanaan (Rp.)						Ket				
								DAU Bebas	DAK Fisik	DAK Non Fisik	DAU Diarahkan					BLUD	Insentif Fiskal	
											Bid Pendidikan	Bid Kesehatan	Bidang PUPR		Bid Kewilayahan			P3K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
3	31	02	2.01		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1,193,896,958	1,193,896,819	555,061,429	0	0	0	0	0	0	638,835,390			
3	31	02	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	174,593,340	174,593,340	174,593,340										
3	31	02	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	338,487,870	338,487,870								338,487,870			
3	31	02	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	31,108,220	31,108,120	31,108,120										
3	31	02	2.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	507,653,962	507,653,931	349,359,969							158,293,962			
3	31	02	2.01	05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	142,053,566	142,053,558								142,053,558			
3	31	02	2.01	06	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri													
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	292,132,960	292,132,960	292,132,960	0	0	0	0	0	0	0			

Perubahan Renja Tahun 2023

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Awal 2023 (Rp.)	Pagu Setelah Perubahan 2023 (Rp.)	Sumber Pendanaan (Rp.)						Ket				
								DAU Bebas	DAK Fisik	DAK Non Fisik	DAU Diarahkan					BLUD	Insentif Fiskal	
											Bid Pendidikan	Bid Kesehatan	Bidang PUPR		Bid Kewilayahan			P3K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
3	31	03	2.01		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	292,132,960	292,132,960	292,132,960	0	0	0	0	0	0	0			
3	31	03	2.01	01	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAs) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	292,132,960	292,132,960	292,132,960										
3	31	03			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	31	03	2.01		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	31	03	2.01	01	Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL						5,609,592,590	5,590,692,590	4,484,220,202	-	-	440,188,834	-	-	-	666,283,270			

BAB IV PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kota Payakumbuh.

Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas, sehingga dalam kegiatan akan ditemui pengurangan dan penambahan anggaran.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2023, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna optimal bagi pembangunan Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Agustus 2023
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh

The image shows a circular official stamp of the Payakumbuh City Government, Department of Labor and Industry. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH' and 'DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PAYAKUMBUH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

NIDA FATWA, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670601 198809 2 001

LAMPIRAN

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Payakumbuh
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														4,123,562,672	4,104,662,811		3,592,751,542		
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														3,481,175,782	3,463,866,791		3,362,423,234	
2	07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														116,948,790	126,021,990		96,446,010
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/kegiatan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A kategori 90 indeks	A kategori 90 indeks	4 Dokumen	4 Dokumen	80 %	80 %	14,863,840	17,917,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	A kategori 90 indeks	11,469,330
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase capaian kinerja program/kegiatan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A kategori 90 indeks	A kategori 90 indeks	3 Laporan	3 Laporan	80 %	80 %	17,998,950	17,998,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	A kategori 90 indeks	14,540,680
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/kegiatan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A kategori 90 indeks	A kategori 90 indeks	11 Laporan	11 Laporan	80 %	80 %	84,086,000	90,106,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	A kategori 90 indeks	70,436,000
2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														2,719,463,800	2,613,223,105		2,716,577,772
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A kategori 90 indeks	A kategori 90 indeks	21 orang/bulan	21 orang/bulan	80 persen	80 persen	2,455,271,800	2,436,371,905	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	A kategori 90 indeks	2,452,327,772

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Payakumbuh
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kode	Urusan/ Bidang/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A kategori 90 indeks	A kategori 90 indeks	1 Dokumen	1 Dokumen	80 persen	80 persen	264,192,000	176,851,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	A kategori 90 indeks	264,250,000	
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											12,600,000	12,600,000			11,157,720		
2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A kategori 90 indeks	A kategori 90 indeks	21 paket	21 paket	100 persen	100 persen	12,600,000	12,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	A kategori 90 indeks	11,157,720	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											229,541,040	274,569,140			184,479,312		
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan sarana penunjang operasional kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A kategori 90 indeks	A kategori 90 indeks	6 paket	6 paket	80 persen	80 persen	1,998,150	1,998,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	A kategori 90 indeks	2,205,401	
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase ketersediaan sarana penunjang operasional kantor	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A kategori 90 indeks	A kategori 90 indeks	10 Paket	10 Paket	80 persen	80 persen	12,000,000	18,882,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	A kategori 90 indeks	1,000,000	
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan sarana penunjang operasional kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A kategori 90 indeks	A kategori 90 indeks	63 paket	63 paket	80 persen	80 persen	28,015,950	32,651,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	A kategori 90 indeks	48,724,140	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Payakumbuh
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase ketersediaan sarana penunjang operasional kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A kategori 90 indeks	A kategori 90 indeks	9 paket	9 paket	80 persen	80 persen	19,344,380	22,193,180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	A kategori 90 indeks	20,863,310			
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase ketersediaan sarana penunjang operasional kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A kategori 90 indeks	A kategori 90 indeks	2 Dokumen	2 Dokumen	80 persen	80 persen	6,004,560	6,004,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	A kategori 90 indeks	6,004,560			
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketersediaan sarana penunjang operasional kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A kategori 90 indeks	A kategori 90 indeks	10 laporan	10 laporan	80 persen	80 persen	10,500,000	10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	A kategori 90 indeks	10,500,000			
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketersediaan sarana penunjang operasional kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A kategori 90 indeks	A kategori 90 indeks	25 laporan	25 laporan	80 persen	80 persen	151,678,000	182,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	A kategori 90 indeks	93,181,901			
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											32,967,000	37,851,000			4,000,000				
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase ASN Yang Memakai Barang Milik Daerah	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A kategori 90 indeks	A kategori 90 indeks	3 Unit	3 Unit	100 persen	100 persen	32,967,000	37,851,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	A kategori 90 indeks	1,000,000			
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											259,456,552	289,402,956			239,471,180				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Payakumbuh
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A kategori 90 indeks	A kategori 90 indeks	1 laporan	1 laporan	80 persen	80 persen	2,205,000	2,205,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	A kategori 90 indeks	2,210,000			
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A kategori 90 indeks	A kategori 90 indeks	1 laporan	1 laporan	80 persen	80 persen	140,000,268	169,947,468	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	A kategori 90 indeks	120,000,000			
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A kategori 90 indeks	A kategori 90 indeks	1 laporan	1 laporan	80 persen	80 persen	117,251,284	117,250,488	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	A kategori 90 indeks	117,261,180			
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											110,198,600	110,198,600			110,291,240				
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan sarana prasarana kantor yang dibayarkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A kategori 90 indeks	A kategori 90 indeks	1 unit	1 unit	80 persen	80 persen	39,190,000	39,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	A kategori 90 indeks	39,190,000			
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan sarana prasarana kantor yang dibayarkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A kategori 90 indeks	A kategori 90 indeks	12 unit	12 unit	80 persen	80 persen	59,400,000	59,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	A kategori 90 indeks	59,400,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Payakumbuh
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2.07.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan sarana prasarana kantor yang dibayarkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A kategori 90 indeks	A kategori 90 indeks	48 unit	48 unit	80 persen	80 persen	5,638,600	5,638,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	A kategori 90 indeks	5,638,600			
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan sarana prasarana kantor yang dibayarkan	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A kategori 90 indeks	A kategori 90 indeks	9 unit	9 unit	80 persen	80 persen	5,970,000	5,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	A kategori 90 indeks	6,062,640			
2.07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA										59,993,860	59,993,860			2,000,000				
2.07.02.2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)										59,993,860	59,993,860			2,000,000				
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,80 %	0,80 %	1 dokumen	1 dokumen			49,954,260	49,954,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	0,80 %	0			
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,80 %	0,80 %	1 perusahaan	1 perusahaan			10,039,600	10,039,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	0,80 %	2,000,000			
2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										440,189,118	440,188,834			87,123,556				
2.07.03.2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi										440,189,118	440,188,834			86,123,556				
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,92 %	3,92 %	68 orang	68 orang	80 persen	80 persen	440,189,118	440,188,834	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	3,92 %	86,123,556			
2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA										114,586,462	112,996,026			119,586,952				
2.07.04.2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota										27,448,030	27,447,880			27,448,390				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Payakumbuh
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 07 04 2.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang terdaftar Yang Ditempatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,35 %	46,35 %	20 orang	20 orang		46.35 %	27,448,030	27,447,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/ko ta	46,35 %	27,448,390	
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja											87,138,432	85,548,146				89,138,562	
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,35 %	46,35 %	250 Orang	250 Orang	80 persen	80 persen	87,138,432	85,548,146	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/ko ta	46,35 %	87,138,562	
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL											27,617,450	27,617,300				21,617,800	
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota											27,617,450	27,617,300				21,617,800	
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,03 %	4,03 %	7 perkara	7 perkara	75 persen	75 persen	23,538,300	23,538,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,03 %	17,538,400	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Payakumbuh
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,03 %	4,03 %	3 perkara	3 perkara	75 persen	75 persen	4,079,150	4,079,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,03 %	4,079,400	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											978,375,956	978,375,848		710,025,435			
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI											686,242,996	686,242,888		680,795,665			
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota											686,242,996	686,242,888		680,795,665			
3 31 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase sentra/klaster industri yang tertata	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,10 % 20 %	0,10 % 20 %	1 dokumen	1 dokumen	66.67 %		174,593,340	174,593,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase sentra/klaster industri yang tertata	0,10 % 20 %	507,653,994	
3 31 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase sentra/klaster industri yang tertata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,10 % 20 %	0,10 % 20 %	1 dokumen	1 dokumen	66.67 %		338,487,870	338,487,870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase sentra/klaster industri yang tertata	0,10 % 20 %	1,000,000	
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase sentra/klaster industri yang tertata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,10 % 20 %	0,10 % 20 %	1 dokumen	1 dokumen	66.67 %		31,108,220	31,108,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase sentra/klaster industri yang tertata	0,10 % 20 %	30,108,415	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Payakumbuh
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase sentra/klaster industri yang tertata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,10 % 20 %	0,10 % 20 %	1 dokumen	1 dokumen		66.67 %	142,053,566	142,053,558	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase sentra/klaster industri yang tertata	0,10 % 20 %	142,033,256	
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI											292,132,960	292,132,960		26,229,770			
3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota											292,132,960	292,132,960		26,229,770			
3 31 03 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Industri yang menerapkan standarisasi mutu produk	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Jumlah Pelaku Usaha Industri Yang Difasilitasi	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,40 %	2,40 %	1 dokumen	1 dokumen	6 IKM	6 IKM	292,132,960	292,132,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Industri yang menerapkan standarisasi mutu produk	2,40 %	25,229,770	
TOTAL												5,101,938,628	5,083,038,659		4,302,776,977			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Payakumbuh
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.31.0.00.02.0001 UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah		
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											507,653,962	507,653,931		516,197,175				
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI											507,653,962	507,653,931		516,197,175			
3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota											507,653,962	507,653,931		516,197,175		
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase sentra/klaster industri yang tertata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,10 % 20 %	0,10 % 20 %	1 Dokumen	1 Dokumen	66.67 %	507,653,962	507,653,931	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase sentra/klaster industri yang tertata	0,10 % 20 %	515,197,175
TOTAL														507,653,962	507,653,931		516,197,175			